

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat beberapa pemaparan teori sebagai acuan penelitian untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dan juga sasaran dari penelitian yang akan dilakukan. Teori penelitian pada pembahasan kali ini merupakan landasan dalam melakukan identifikasi perubahan parsial di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

2.1 Proses Terbentuknya Ruang serta Klasifikasi Penggunaan

Asal muasalnya masyarakat sipil ialah individu ada dalam kondisi alami pra-Sosial, dan bahwa hubungan mereka menimbulkan masalah. Masyarakat sipil dipandang sebagai ruang sosial dimana individu pribadi dan egoistik mengejar kepentingan pribadi, kepemilikan pribadi menjadi media individualistik di bawah payung perlindungan Negara untuk membentuk citra diri kontraktual (Hobbes, 1968; Taylor, 1989: 159-76). Chapin dalam fan (2007) menjelaskan bahwa variabel yang digunakan untuk mempelajari sebaran ruang aktivitas yakni berdasarkan jenis kegiatan, waktu beraktifitas dan tempat kegiatan berlangsung. Ruang merupakan wadah bagi makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya, Ruang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara. Adapun tata ruang pada dasarnya terbentuk oleh gerak makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara itu tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.1 Pengertian Ruang

Ruang merupakan sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bisa secara langsung di analisis Relp (1967). Ruang dapat dimaknai sebagai tempat apabila ruang tersebut di maknai oleh orang yang menggunakannya, William dan Carr (1983). Menurut Ayadinata (1992), Ruang merupakan seluruh permukaan bumi yang terdiri dari biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan dan manusia. Aktivitas manusia membutuhkan ruang sebagai wadah interaksi, sehingga ruang yang terbentuk oleh manusia dibagi menjadi ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah tempat untuk menampung seluruh aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu, dimana ruang publik tergantung pada aktivitas manusia itu sendiri, Hakim (1987).

Ruang sebagai wadah harus bisa menyediakan lingkungan yang kondusif demi terpenuhinya syarat interaksi berupa kontak dan komunikasi sosial. Carr (1992) mengungkapkan bahwa tipologi ruang publik tergantung pada kegiatannya, lokasi dan proses terbentuknya. Carr membagi tipologi ruang publik antara lain yakni jalan, taman bermain, jalur hijau, pasar dan ruang spontan dalam lingkungan hunian. Sedangkan menurut Roger Scurton (1984), ruang publik memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat satu sama lain dan harus mengikuti norma norma yang berlaku di lingkungan setempat.

Carmona (2003), membagi ruang publik mejadi 3 tipe yaitu *External public space*, yakni ruang publik yang bisa di akses oleh semua orang seperti taman kota, alun alun, pasar dan jalur pejalan kaki. *Internal public space*, ruang publik seperti ini merupakan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga. *External and internal public space*, ruang publik seperti ini berupa fasilitas umum yang dikelola oleh sektor privat dan ada aturan atau batasan yang harus dipatuhi seperti mall, diskotik dan sebagainya.

Carmona (2008) membagi ruang publik menjadi beberapa jenis yaitu *Positive space* adalah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang bersifat positif biasanya dikelola oleh pemerintah, bentuk dari ruang ini berupa ruang alami, ruang publik dan ruang terbuka publik. *Negative space*, yakni ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan publik secara optimal karena karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosialserta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik, ruang ini seperti ruang servis, dan ruang ruang yang ditinggalkan karena kurang baiknya perencanaan. *Ambiguous space*, ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama seperti pertokoan, cafe, rumah peribadatan, dan ruang rekreasi. *Private space*, ruang ini merupakan ruang yang dimiliki secara pribadi oleh warga, antara lain halaman rumah dan ruang dalam bangunan.

Menurut Undang Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka ,tempat tumbuh tanaman, baik yang alamiah maupun di sengajai. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan kawasan tersebut yakni fungsi ekologis, yakni untuk meningkatkan kualitas air, menurunkan peluang terjadinya banjir, serta mengurangi polusi udara. Fungsi sosial budaya, berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan penanda kawasan. Fungsi ekonomi, berfungsi sebagai daerah wisata hijau di perkotaan, yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat, wisatawan lokal, hingga wisatawan asli yang mengunjungi tempat ini.

2.1.2 Faktor Perubahan Ruang.

Perkembangan suatu ruang kota dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi baik skala mikro maupun makro, Susanto (1994). Sebagian besar terjadinya perkembangan kota berawal dari desa yang mengalami perkembangan secara pasti antara lain desa berhasil menjadi pusat pemerintahan, perdagangan,pertambangan dan pusat pergantian transportasi (Ilahan 1990). Tipe dasar perkembangan kota, merupakan pertumbuhan yang mencakup perluasan permukiman yang sudah ada dan permukiman yang baru. Sedangkan transformasi merupakan perubahan menerus bagian-bagian permukiman perkotaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuninya. Doxiadis (1968). Unsur unsur pembentukan ruang ada 4 unsur yaitu :1)Individu manusia (Antropos) dan masyarakat (Society) di kota besar, terdapat perbedaan komposisi umur dan

jenis kelamin, dalam struktur pekerjaan, dalam pembagian tenaga buruh dan struktur social. Hal ini memaksa manusia untuk mengembangkan karakteristik yang berbeda sebagai individual, kelompok, unit dan komunitas. 2) Ruang kehidupan (Shells) Ruang kehidupan dari perumahan perkotaan memiliki banyak karakteristik meskipun ukurannya bervariasi. Semakin besar ukuran perumahan, semakin internasional karakteristiknya; sementara semakin kecil ukurannya semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal. 3) Jaringan (Network) Salah satu cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur permukiman adalah berhubungan dengan jaringan dan terutama sistem sirkulasi – jalur transportasi dan titik-titik pertemuan (nodal point). 4) Alam (nature) Rumah-rumah kecil perkotaan dapat dibangun di lembah puncak bukit atau gunung untuk menjaga dari keamanan akan tetapi rumah-rumah besar membutuhkan dataran yang luas dan berdekatan dengan jalur utama komunikasi untuk tetap bertahan Doxiadis dalam Pontoh (2009). Klasifikasi penggunaan lahan meliputi: lahan permukiman, lahan perdagangan, lahan pertanian, lahan industri, lahan jasa, lahan rekreasi, lahan ibadah. (Sutanto,1977). Menurut Wongso perkembangan dan bentuk struktur kota dapat diketahui melalui perubahan elemen elemen kota sebagai pembentuk ruang kota. Elemen tersebut merupakan elemen fisik dan non fisik. Elemen fisik meliputi sarana transportasi, pasar, pusat pemerintahan, ruang terbuka hijau, pusat peribadatan dan permukiman. sedangkan non fisik adalah manusia dengan segala aktivitasnya. (wongso,2001).

Proses terjadinya struktur spasial perkotaan ada tiga yaitu proses alami, direncanakan dan gabungan keduanya. Pola spasial

adalah hasil dari interaksi alam dan pasar serta kegiatan usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pola ini menghasilkan tiga model pola penggunaan lahan konsentris, sektoral dan inti majemuk sedangkan pola spasial yang direncanakan biasanya diterapkan pada kota/kawasan permukiman baru. (Hermanis,1996). Sementara itu menurut Yunus ada 3 macam bentuk perkembangan fisik dan keruangan kota, yaitu:

1. Perembetan Konsentris (concentris development), yaitu pola pertumbuhan fisik yang merata ke semua sisi yang akan membentuk kenampakan morfologi kota yang relatif kompak.
2. Perembetan Memanjang (ribbon development), yaitu pola pertumbuhan fisik sepanjang jalur transportasi. Perembetan memanjang membuat pembangunan tidak merata ke semua sisi
3. Perembetan Melompat (leap frog development), yaitu pola perembetan fisik kota yang berjalan secara sporadis dan tumbuh ditengah-tengah lahan pertanian (yunus, 2002).

Colby dalam Zulkaidi (1999) mengidentifikasi bahwa ada dua gaya yang saling mempengaruhi dalam pembentukan dan perubahan guna lahan perkotaan yaitu *Gaya Setripetal*, gaya ini terjadi diakibatkan kualitas pusat kota seperti kawasan perdagangan, aksesibilitas, aglomerasi dan kenyamanan fungsional. *Gaya Sentrifugal* adalah gaya yang mendorong kegiatan berpindah dari pusat kota ke pinggiran kota, yang

meliputi: *Gaya Spasial* yang terjadi diakibatkan oleh pusat kota sering terjadi kemacetan sedangkan wilayah yang lain masih kosong. *Gaya Site* di akibatkan oleh daya tarik guna lahan ekstensif atau gaya tarik alam dibagian pinggiran kota dibandingkan guna lahan intensif di pusat kota. *Gaya Situasional*, gaya tarik yang di akibatkan oleh kenyamanan di pinggir kota. *Gaya Evolusi Sosial*, akibat oleh tingginya nilai pajak tanah dan keterbatasan ruang di pusat kota. Perubahan penggunaan lahan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya. 2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota. 3. Jaringan jalan dan sarana transportasi. 4. Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi (Cullingswoth, 1997).

2.1.3 Klasifikasi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan, baik yang permanen maupun daur ulang demi kepentingan pemenuhan kebutuhan kebendaan atau kejiwaan, Vink (1975). Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan tiap daerah lahan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, juga sebagai usaha manusia dalam mengelola dan melestarikan ekosistem sehingga mendapatkan manfaat dari lahan tersebut, penggunaan lahan juga harus sesuai dengan prioritas pembangunan agar tidak menimbulkan kerusakan lahan, Lestari dan Simanungkalit (2016).

Klasifikasi penggunaan lahan meliputi lahan permukiman, lahan perdagangan, lahan pertanian, lahan industri, lahan perdagangan dan jasa, lahan rekreasi dan lahan peribadatan,

Sutanto (1977). Kemampuan lahan disuatu wilayah dapat bervariasi oleh karena perbedaan faktor topografi, relief, jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan, worosuprojo (1990). Yunus (2008), menyebutkan bahwa daerah pinggiran perkotaan sebagai *Peri Prban*, wilayah peri urbah didefenisikan sebagai wilayah yang mengalami pencampuran fisik kekotaan dan kedesaan. Dalam teori Land Use Triangle, Yunus menjelaskan bahwa semakin ke arah perkotaan dibangun maka semakin besar proporsi kedesaannya. Bintaro (1977), mengungkapkan bahwa pola perubahan penggunaan lahan antara lain adalah pola memanjang mengikuti jalan, sungai, radial dan pola tersebar, mengikuti garis pantai dan rel kereta api. Restina(2009) dalam tesisnya menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyimpangan ialah kepadatan penduduk, luas lahan pertanian, bangunan dibantaran sungai, dan jarak ke pusat perkotaan.

Clawson dan Stewart (1965), mengidentifikasi konsep penggunaan lahan sebagai berikut: *Lokasi*, merupakan dasar bagi semua data tentang lahan karena merupakan aspek yang tidak dapat berubah. *Aktifitas pada lahan*, biasanya penggunaan lahan seperti untuk tanaman pangan, perkebunan, pemerintahan, pabrik, permukiman, lapangan permainan, pusat perdagangan, dan rekreasi. *Kualitas lahan alami*, diantaranya sifat antara permukaan dan lapisan bawah lahan serta vegetasi tutupan lahan, biasanya digunakan untuk mengukur kualitas lahan untuk dapat mengerti kualitas data lahan, sementara itu, pada kualitas tertentu adakalanya menuai kritikan karena yang lain hanya penting sementara yang lainnya hampir tidak berarti. *Perbaikan pada lahan*, dapat berupa pendataan, penibuanan, perbaikan drainase, atau pada lahan

periode lama. Demikian untuk perdagangan dibutuhkan kompleks pertokoan. Intensitas penggunaan lahan, hal ini menunjukkan jumlah aktivitas dalam sebuah luasan lahan, dikenal dengan istilah seperti lahan bera, dan lahan pertanian intensif. *Penyepakatan lahan*, meliputi kepemilikan lahan, penggarapan lahan dan hubungan antara pemilik dan penggarap lahan jenis penyepakatan lahan sering digunakan pada lahan pertanian dan lahan daerah perdesaan di perkotaan. *Hubungan antar lahan di antara bidang lahan yang berbeda*, faktor luar pada lahan tersebut cenderung mempengaruhi aktivitas lahan dibandingkan faktor dari dalam, dengan adanya sarana transportasi dapat mempengaruhi aktifitas dan nilai lahan tersebut. *Interrelasi antara aktivitas pada lahan dan aktifitas sosial ekonomi*, dalam hal ini berkaitan erat dengan hubungan pekerjaan, pendapatan dan investasi.

2.2 Hak Atas Tanah.

Hak atas tanah merupakan hak yang diberi wewenang kepada perseorangan yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut, Sayekti (2000). Menurut Harsono (2000), pemegang hak milik atas tanah dipunyai oleh perorangan yakni sebagai warga negara, oleh karena itu hak milik diperuntukan untuk warga negara yang berkewarganegaraan tunggal. Menurut Sitorus (2016), pembagian bentuk status kepemilikan lahan sebagai berikut: *Kepemilikan Negara*, hak dan kepemilikan dikuasai oleh otoritas negara tetapi boleh diberikan oleh beberapa individu. *Kepemilikan Pribadi*, hak kekayaan dimiliki oleh individu atau badan hukum, sebagian dapat dibatasi Negara. *Kepemilikan Komunal*, hak kekayaan dimiliki oleh masyarakat anggota kelompok dapat memanfaatkan, sementara yang di luar anggota tidak boleh menggunakan

lahan tersebut. *Kepemilikan Akses Terbuka*, hak milik tidak ditegaskan dan akses tidak diatur, biasanya diperuntukan oleh lahan negara.

Dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 ayat 1, memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya. Jenis hak tanah dalam UUPA di bagi menjadi dua yaitu yang bersifat tetap dan bersifat sementara antara lain: hak atas tanah bersifat tetap terdiri: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa tanah bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. hak atas tanah yang bersifat sementara terdiri dari: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak Menumpang, hak sewa tanah pertanian.

A. Hak Milik.

Hak milik merupakan hak turun temurun dan dapat dialihkan kepada pihak lain, hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup tetapi bisa wariskan kepada pewaris untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Menurut Tunardi (2012), Hak milik bisa disebabkan oleh hukum adat melalui pembukaan tanah, penetapan pemerintah melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengus tanah. Hak milik dapat terhapus apabila tanah tersebut jatuh kepada negara untuk petentingan umum, bersama dari rakyat dengan memberi ganti kerugian yang layak, Undang Undang Pokok Pokok Agraria (UUPA) pasal 18.

B. Hak Pakai.

Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil langsung oleh negara atau hak milik orang lain yang diberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu

selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, diberikan secara cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun, serta tidak boleh disertai syarat yang mengandung unsur pemerasan. UUPA (1960).

C. Hak Ulayat.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya, Harsono (2003). Hak ulayat diperuntukan hanya kepada setiap anggota masyarakat adat untuk mengelola atau memanfaatkan tanah, orang luar tidak diperuntukan untuk mengelola kecuali atas izin masyarakat adat setempat. Pada pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

2.3 Kondisi Awal Pulau Buru

Seperti pada umumnya, masyarakat Pulau Buru merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir dan gunung sehingga memiliki hubungan terbuka dengan masyarakat luar, sementara daerah pedalaman merupakan masyarakat asli yang disebut dengan Suku Alifuru, awalnya pola persebaran masyarakat Pulau Buru tersebar di daerah pesisir dan pegunungan hingga Belanda memusatkan masyarakat Pulau Buru ke Kayeli (pusat pemerintahan Belanda pada zaman kolonial), sehingga pola permukiman masyarakat Pulau

Buru jadi terpusat, Grimes (2006). Pulau Buru merupakan pulau terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Pulau Seram. Pulau Buru juga terbagi atas dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Sebelum diduduki oleh kolonial Belanda pulau Buru masuk sebagai wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Ternate, Leirissa (1973).

Pulau Buru tercatat dalam rute perjalanan ekspedisi Fransisco Serrao pada tahun 1512 ekspedisi yang bertujuan untuk menarik rempah rempah, Andaya (1993). Rumphius (1910) mengungkapkan bahwa pada Tahun 1648 ekspedisi VOC menghancurkan pohon pohon cengkeh yang produktif di Selatan Pulau Buru. Pada Tahun 1658 Gubernur VOC melakukan perjanjian dengan 13 pemimpin (Raja) yang ada di Pulau Buru untuk membangun benteng pertahanan tepatnya di Kayeli, adapun Raja pada masa itu antar lain adalah Raja Lumaite, Hukumina, Palamata, Tomahu, Masarete, Waisama, Marulat, Leliali, Tagalisa, Ilat, Kayeli, Bara, dan Lisela, Grimes (2006).

Dari catatan perjanjian yang ada, Kecamatan Waeapo merupakan lokasi yang murni dibangun oleh tahanan politik tepatnya pada masa pembuangan diakhir Tahun 1969. Pada awal pendudukan Belanda di Pulau Buru, komoditi unggulan yang ada di Pulau Buru yaitu hasil hutan berupa cengkeh, pala, kayu arang dan kayu putih, selain itu ada juga minyak kayu putih dari hasil penyulingan daun pohon kayu putih, Miller (2012).

A. Tradisi dan Kebudayaan Pulau Buru

Buru dikenal juga dengan nama Bupolo yang merupakan nama asli dari Pulau Buru yang juga memiliki arti Dampolot artinya penuh pecek dan rawa. Istilah Bumi Lalen juga merupakan nama lain dari Pulau Buru yang didataran Danau Rana dan Gunung Date yang dipercayai

tempat asal muasal nya nenek moyang orang orang Pulau Buru, Eirumkuy (2013). Masyarakat asli Pulau Buru (Gaba Bupolo) merupakan masyarakat pegunungan yang bertempat tinggal disekitar Gunung Date dan Danau Rana, sementara orang orang pendatang (Geba Misnit) hidup di daerah pesisir pantai, sebagai jalur aktivitas kontak dagang dan merupakan tempat bermukim orang di luar Pulau Buru. Gunung date diartikan sebagai laki laki yang menjaga danau Rana.

Kabupaten Buru mengenal juga sistem pemerintahan adat, hingga saat ini masih diberlakukan, dinamai *Lissela Tanggar Telo* yang artinya Pemerintahan Adat Tiga Tingkatan, berikut susunan pemerintahan adat:

1. Sufen (pintu) berada di Desa Wamlana. terdapat Paa (Penjaga pintu) yaitu Raja, *Henolon* dan *Bubator Pito* (Tujuh Kepala Soa).
2. *Seget Natan Rua* (Dua Seget) yakni *Seget Natan Fnabo* dan *Seget Natan Waeili*.
3. *Matgugul Rua* (Dua Matgugul) yaitu *Matgugul Waekolo* dan *Matgugul Nalbesi*.

Sistem pemerintahan adat ini tidak bersifat hirarki, mekanisme pemerintahan yakni jika masyarakat luar Pulau Buru ingin memasuki Danau Rana mereka harus menghadap Raja sebagai penjaga pintu dan menyampaikan maksud dan tujuannya, setelah itu Raja memerintahkan *Henolon* untuk melanjutkan pesan tersebut kepada *Seget Natan Waeili*, dan dilanjutkan lagi

kepada *Kepala Soa Waeili* kemudia *Kepala Soa Waeili* memerintahkan *Mrimo* menyampaikan titah kepada *Matgugul Nalbesi* sebaliknya jika ingin ke *Matgugul Waekolo*. Untuk tahapan penyelesaian masalah biasanya seluruh Kepala Soa dan Raja duduk bersama, dalam menyelesaikan masalah, tahapan tahapan berikut menjadi solusi penyelesaian masalah, yaitu: Menyelesaikan secara Kai Wait (Kekeluargaan). Faka Ua yaitu belah rotan atau kelapa. Kanmane yaitu sumpah adat yang bersumber secara rahasia dan dilakukan oleh Raja.

2.4 Proses Penguasaan, Legalitas dan Pemanfaatan Lahan di Maluku.

Sesuai Undang Undang Pokok Agraria pasal 3 bahwa sepanjang bentuk kekuasaan masih ada maka, legalitas kepemilikan tanah serta bentuk kekuasaan atas tanah adat masyarakat di Maluku hingga hari ini masih ada dan dipergunakan untuk pertanian, permukiman hingga lahan keramat. Penguasaan tanah merupakan hal yang cukup sensitif bagi masyarakat Maluku pada umumnya, penguasaan tanah bukan hanya persoalan ekonomi dan kesejahteraan semata, tetapi memiliki keterkaitan dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kultur, dan religius, Matuankotta (2013). Abdurahman (1973), menegaskan bahwa masyarakat adat di Maluku dengan penguasaan tanah adatnya (Hak Petuanan) masing masing telah ada dengan hadirnya Bangsa Portugis yang datang untuk mencari rempah rempah dan berdagang disekitar Tahun 1512-1602.

Hak petuanan merupakan hak atas kekuasaan pada suatu wilayah, bagi masyarakat Maluku hak petuanan tidak hanya terdapat di darat (tanah) tetapi petuanan juga meliputi kekuasaan atas laut, kedua ini sama penting. Awal penguasaan tanah oleh petuanan yang ada di Maluku dilatar belakangi oleh proses yang beragam sesuai dengan lokasi atau pulau tersebut, namun

pada umumnya penguasaan atas kepemilikan lahan memiliki pola yang sama yakni orang-orang yang pertama kali menempati tempat tersebut mengawali penguasaan atas wilayah petuanan. Di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, penguasaan tanah ada pada Negeri, Soa, dan Mata Rumah. Sama halnya kepemilikan tanah yang ada di Maluku Tengah, yakni mengenal tiga konsep kepemilikan lahan yaitu Hak Petuanan, Mata Rumah, Fam dan tanah milik pribadi atau kepala keluarga yaitu Tanah Pusaka.

Matuankotta (2013), menerangkan bahwa budaya membuka lahan untuk bermukim dan berkebun merupakan pemanfaatan lahan yang dilakukan pertama kali ketika mendiami wilayah kepulauan yang ada di Maluku, dilanjutkan dengan berburu dan meramu hasil hutan kemudian dengan meletakkan tanda pada titik terjauh yang dapat mereka capai dari permukiman kemudian menarik garis lurus dari semua tanda maka menjadi luas wilayah petuanan tersebut. Dalam pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada kemaslahatan bersama, salah satu buktinya dengan penerapan Hukum Sasi sebagai alat hukum adat yang umum dilakukan oleh masyarakat Maluku. Sasi adalah suatu ketentuan hukum adat yang melarang siapa saja untuk mengambil sesuatu di alam sekitar baik di darat maupun di laut dalam suatu masa tertentu dalam rangka menjamin kelestariannya, Topatimasang (2005). Contoh Sasi pada bentangan daratan misalnya Sasi Ewang yaitu sasi hutan, sasi dusun sagu dan sasi kelapa demi menjaga kelestariannya. Ada juga sasi yang bersifat abadi untuk kawasan hutan primer yang dikeramatkan dan juga ada beberapa satwa yang termasuk dalam hukum sasi abadi tersebut.

A. Pemanfaatan Lahan oleh Tahanan Politik di Pulau Buru, Provinsi Maluku.

Pemanfaatan ruang sangat berhubungan erat dengan aspek sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial,

budaya ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung budidaya, estetika bangunan serta meliputi ruang dan waktu yang dalam sebuah kesatuan membentuk tata ruang, Mokodongan dkk (2014). Setelah peristiwa G30S PKI pengiriman tahanan politik yang dianggap termasuk dalam peristiwa tersebut dikirim ke Pulau Buru sebagai tahanan politik pada Tahun 1969 hingga Tahun 1977 yang berjumlah 14.000 tahanan politik, ditempatkan di hutan belantara Pulau Buru, Ricklef (2010). Sindhunata (2007) menerangkan bahwa untuk menampung tahanan politik yang ada maka pemerintah berinisiatif membuka lahan bagi tahanan politik yang nantinya berkembang menjadi Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kawasan ini berkembang dengan cara, para tahanan politik diperintahkan untuk membuka lahan persawahan seluas 1.482 hektar.

Proses pengiriman tahanan politik dilakukan dengan beberapa tahap, tahap pertama pada bulan Agustus Tahun 1969 sebanyak 850 orang, pada bulan Desember Tahun 1969 sebanyak 1.650 orang dan pada bulan Juli, Agustus hingga September Tahun 1970 sebanyak 5.000 orang disusul dengan pengiriman keluarga tahanan politik untuk menjadikan hutan belantara tersebut menjadi tempat bermukim. Hidayatullah (2019) mengungkapkan bahwa setelah masa penahanan selesai tahanan politik dijanjikan rumah layak huni dan lahan garapan dalam program transmigrasi namun semua tidak berjalan dengan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah, tahanan politik di Pulau Buru dalam pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Waeapo hanya memiliki hak pakai tidak punya hak milik atas lahan, baik tempat tinggal maupun lahan pertanian.

B. Pembangunan Infrastruktur oleh Tahanan Politik di Pulau Buru.

Penggunaan lahan non pertanian pada dasarnya merupakan penggunaan lahan di luar pertanian termasuk diantaranya penggunaan lahan perkotaan, penggunaan lahan kawasan industri, sistem jaringan jalan, daerah rekreasi dan konservasi atau cagar alam, Sitorus (2016). Kondisi awal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Memiliki lahan yang gersang diantaranya padang rumput dan hutan belantara hingga tahanan politik yang telah diisolasi dipaksa untuk membangun sebuah desa layak huni yang nantinya menjadi tempat aktivitas tahanan politik dengan pembangunan jalur pasokan merupakan pembangunan pertama yang dilakukan oleh para tahanan politik, jalur yang dibangun menghubungkan Unit III dengan pos transkop kemudian dilanjutkan dengan Unit III dengan Air mendidih dengan panjang 8 Km, Lebar 1,5 Meter. Selain itu para tahanan juga dipaksa untuk membangun barak tambahan, pos komando, markas, pos penjagaan wisma, tempat tinggal komandan, gedung kesenian, rumah sakit, gereja dan membuat pekarangan dengan menanam sebanyak 26 pohon sehingga menjadikan kawasan tandus menjadi daerah layak huni.

C. Pertanian dan Pangan oleh Tahanan Politik di Pulau Buru.

Pengubahan lahan tandus menjadi lahan produktif sangat memeras tenaga, para tahanan di paksa menyulap lahan gersang menjadi sawah, yang di antaranya berupa sawah kering, ladang dan huma berhektar hektar hingga akhir masa tahanan politik pada tahun 1979 telah di buka 3. 532,6 hektar lahan pertanian. Awalnya

pembukaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan para tahanan sehingga tidak menunggu pasokan makanan dari luar selama berada di pulau Buru yaitu dengan mengisolasi mereka dari masyarakat dengan biaya serendah mungkin, yang mengakibatkan para tapol kekurangan gizi dan terkena berbagai penyakit. Selama pembukaan lahan para tapol mengunsumsi apa saja yang ditemui di hutan untuk menyambung hidup.

Pekerjaan pertama yang di lakukan untuk membangun lahan pertanian yaitu membuat saluran pembuangan air dan memabat pohon, setelah lahan dibuka lahan di bagi berupa petak petak sawah dicangkul dan dilakukan pendataran, setelah itu membuat irigasi dan bendungan. Pengerahan pekerjaan dalam membuka lahan pertanian menghasilkan panen padi 80 Ton. Namun hasil panen tidak semua untuk para tahanan politik tetapi tahanan politik hanya di beri jatah beras 153 kg.

2.5. Proses Perubahan Ruang di Pulau Buru.

Perubahan ruang adalah suatu proses perubahan dari suatu keadaan ke suatu keadaan lain dalam waktu yang berbeda. Perubahan keadaan tersebut didasarkan pada waktu yang berbeda untuk analisa ruang yang sama. Proses tersebut terjadi secara alami atau campur tangan manusia dalam menangani arus perubahan keadaan tersebut. Tinjauan perkembangan pola dan struktur ruang fisik dapat dilihat dari aspek sosial politik ekonomi dan budaya, (Yunus, 1994). Menurut Cullingswoth (1997) perubahan penggunaan lahan yang cepat di perkotaan, dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya, aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota, jaringan jalan dan sarana transportasi, orbitasi yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi.

Mansyur (2014) dalam jejak kolonial Belanda di Pulau Buru pada Abad 17-18 Masehi mengungkapkan bahwa proses perubahan ruang besar besaran terjadi ketika VOC menduduki Pulau Buru dalam mencari rempah rempah lantas memusatkan seluruh aktivitas masyarakat kepulauan Buru ke Desa Kayeli sebagai pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial dan juga mendirikan benteng pertahanan untuk melindungi kepentingan pengelolaan rempah rempah yang ada di Pulau Buru, dari jejak pemindahan pusat permukiman ke Kayeli setelah selesai masa penjajahan kolonial Belanda Ibu Kota Kabupaten yang tadinya berada di Kayeli berpindah tempat ke Namlea sebagai Ibu Kota Kabupaten Buru. Perubahan aktivitas masyarakat dibuat dengan perjanjian antara Gubernur VOC dengan para Raja setempat yang berjumlah 13 Petuanan yang ada di Pulau Buru dengan dalilil pembangunan benteng pertahanan.

A. Periodisasi.

Penduduk Pulau Buru digolongkan atas tiga kelompok periode menetapnya yaitu Orang Buru asli atau penduduk yang pertama kali mendiami pulau tersebut, mereka ini oleh para pendatang disebut *Alifuru*, yang bermukim dan tersebar di area pegunungan, sebagai penduduk asli biasanya diistilahkan dengan *Geba Emlia*. Kemudian kelompok para pendatang, secara spontan kelompok ini datang dan menetap di Pulau Buru, kelompok ini berasal dari berbagai daerah seperti Sula, Sanan, Buton, Banda, Jawa, Bugis-Makassar, Orang Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, sebagai pendatang mereka diistilahkan dengan istilah *Geba Maleli*, pada umumnya kelompok pendatang mendiami daerah pesisir, *Geba Maleli* juga termasuk orang buru yang tinggal di Belanda dan kemudian kembali selama 40 tahun lamanya. Kelompok ketiga adalah pendatang baru dari Pulau Jawa yaitu Transmigran Nasional

dan Transmigran angkatan bersenjata yang biasa disebut dengan Tahanan politik, dari kodam XV Pattimura Ambon dan para pensinunan Angkatan Darat, kelompok ini ditempatkan didataran rendah Waeapo dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mengembangkan usaha pertanian, Pattikayhatu dkk (1999).

Perkembangan perubahan ruang yang ada di Pulau Buru, mengalami lima periodesasi yang datang dari pengaruh pendudukan, Pattinama mengungkapkan bahwa periode tersebut diantaranya: Periode Sultan Ternate, Portugis, Belanda, Jepang dan Indonesia. Periode Sultan Ternate, selain melakukan perdagangan juga melakukan mobilisasi masa dari Sula dan Sanana untuk menanam kelapa, hubungan dagang kayu putih dilakukan dengan Sultan Buton dan Sultan Bone, kemudian Portugis melakukan instabilitas perdagangan dengan Sultan Ternate, pedagang Arab dan Cina, Pattinama (2013)

Tabel 2.1 Kajian Jurnal dan Penelitian Terdahulu

NO	JURNAL	TUJUAN	VARIABEL	METODE PENELITIAN	KELUARAN/HASIL
1	<p>Perkembangan struktur ruang kota semarang periode 1960-2007.</p> <p>Oleh : Feri Ema Kurniawati.</p>	<p>Mendiskripsikan perkembangan Struktur Ruang Kota Semarang dari masa pasca Kolonial sampai sekarang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan Struktur Ruang Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur ruang kota Meliputi: • Perdagangan dan jasa • Pusat rekreasi • Permukiman • Perkantoran • Jaringan jalan 	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Struktur Ruang Kota Semarang dari periode ke periode cenderung mengikuti model perkembangan Konsentris, Sektoral, dan Pola Inti Ganda. Sementara itu Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Kota Semarang adalah struktur kekuasaan, letak dan kedudukan Kota Semarang dalam konteks regional, perkembangan penduduk, serta faktor kebijakan pemerintah dan perencanaan kota.

			<ul style="list-style-type: none"> • Terminal dan pelabuhan • Faktor perubahan struktur ruang. • Struktur kekuasaan • Perkembangan penduduk <p>Kebijakan pemerintah.</p>		
2	Dinamika penggunaan lahan di wilayah perkotaan (Studi di Kota Bandar		<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Pertanian • Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif • kuantitatif Location 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota yang mencerminkan laju; pola dan dampak yang beragam pada masing-masing bagian wilayah kota.

	Lampung) Oleh: Bambang Utoyo S		<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengelolaan tanpa migas • Listrik dan air bersih • Perdagangan • hotel dan restoran • Sosial • politik 	<p>Quotient (LQ)</p> <p>Shift-Share Analysis (SSA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk dan preferensi masyarakat (yang merupakan refleksi dari variabel modal informasi dan aksesibilitas) merupakan faktor pemicu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tercermin pada perubahan pola pemanfaatan ruang wilayah kota. <p>Selama hampir satu dekade pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung ditopang oleh sektor perekonomian di luar sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian. Sedangkan dalam jangka panjang competitiveness pertumbuhan ekonomi kota didukung oleh sektor pertanian; industri pengolahan non-migas; dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.</p>
3	Karakteristik struktur kota dan pengaruhnya terhadap pola pergerakan di kota Medan	1.Mendeskrripsikan bentuk dan karakteristik struktur kota Medan berdasarkan faktor-faktor pembentuk struktur kota,mengetah		<p>Deskriptif Analisis bangkitan pergerakan dan distribusi pergerakan dan interaksi pergerakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor utama dari struktur kotayang mempengaruhi pola pergerakan di kota medan adalah sektor perdagangan sebab, daerah yang merupakan penarik pergerakan terbesar berada pada pusat kota meda. • Berdasarkan data-data pembentuk struktur kota Medan yaitu data kependudukan, tata guna lahan berupa pemukiman, pendidikan, perdagangan, jasa dan industri serta jaringan jalan, maka dapat disimpulkan bahwa kota

	<p>oleh daniel S. Pasaribu dan Jeludin Daud.</p>	<p>ui pengaruh dari struktur kota tersebut terhadap pola pergerakan yang terjadi di kota Medan.</p> <p>2. Sebagai referensi untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota Medan dengan mengetahui karakteristik struktur kota Medan, dan pengaruhnya terhadap pola pergerakan 3. Memberikan masukan khususnya kepada Pemerintah</p>			<p>Medan memiliki struktur kota dengan tipe multiple nuclei atau struktur kota dengan pusat kegiatan yang tidak berpusat pada satu kawasan saja</p> <p>Medan memiliki pola jaringan jalan yang berbentuk grid pada daerah pusat kota dan berbentuk radial. Keuntungan dari pola ini jaringan jalan ini adalah efektif dalam penggunaan lahan yang terbatas.</p>
--	--	--	--	--	---

		dalam menerapkan kebijakan penataan struktur tata ruang kotanya berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pola pergerakan di kota Medan.			
4.	Kajian perubahan penggunaan lahan dan struktur ruang kota biama. Oleh Bambang Setiawan, Iwan Rudiato	Mengkaji perubahan penggunaan lahan ruang kota, serta faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian lahan kering • Hutan sawah • Permukiman • Tambak • Perdagangan dan jasa 	Deskriptif kualitatif Dan Overlay peta ArcGIS	Penggunaan lahan terbesar secara berturut turut meliputi, pertanian lahan kering,hutan sawah permukiman,tmbak,perdagangan dan jasa pemerintahan,pendidikan,pelabuhan dan terminal. Sementara perubahan penggunaan lahan yang paling dominan adalah lahan permukiman. Adanya pertumbuhan penduduk,peningkatan aktivitas dan sarana prasarana dari tahun 1999-2004 belum menunjukkan perubahan struktur ruang yang signifikan karena perkembangan kota hanya berada pada pusat kota belum menumbuhkan perkembangan kota yang baru.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Pendidikan • Pelabuan terminal 		
5	<p>Jejak VOC Kolonial belanda di Pulau Buru</p> <p>Oleh: Syahrudin Mansyur</p>	Identifikasi jejak kolonial di pulau buru		Survei Arkeologi	Pola persebaran kolonial belanda di Pulau Buru.
6	Akulturas budaya mahasiswa dalam pergaulan sosial di kampus oleh: Tri Astuti	Melihat perbedaan corak pergaulan.		Kualitatif	Akulturas merupakan percampuran kebudayaan, berdampak dari dinamika di kampus yang sangat beragam tanpa membedakan agama,ras, dan budaya

7	Budaya lokal Maluku “pela gandong” dalam konteks perilaku organisasi oleh : Elsian Huberta Aponno			Kuantitatif	Sejarah kebudayaan pela gandong, pengertian pela gandong, budaya sebagai proses budaya.
8.	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopo Watumohai Oleh : Sahrina Safiudin		Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat, Taman Nasional		Konsep hubungan hak ulayat dengan hak menguasai Negara, Implementasi Hubungan Hak Ulayat dengan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopo Watumohai.
9	Identifikasi perubahan struktur ruang pada jalan	•	• Struktur Ruang, Budaya	• Kuantitatif	Penggunaan lahan yang ada di kecamatan kraton telah mengalami perubahan akibat dari perkembangan perdagangan dan jasa. Struktur ruang yang berada di Kecamatan Kraton dari aspek fisik seperti fungsi bangunan, bentuk

	utama kecamatan kraton D.I Yogyakarta Jerzi Budiarto dan Djoko Suwandono		Jawa, Kraton.		bangunan, guna lahan, dan sebagainya mengalami perubahan cukup pesat terkecuali dari pola jalan yang berbentuk grid yang terbentuk dahulu hingga sekarang.
10	Karakterisasi Sumberdaya Lahan dan perwilayahan Komoditas Unggulan perkebunan di Pulau Buru oleh Mubekti	Mengevaluasi lahan dalam memberikan informasi tentang karakter sumberdaya lahan di Pulau Buru.	Evaluasi lahan, Kesesuaian lahan, pewayalahan komoditas pertanian.	Kuantitatif	Sebagian lahan di Pulau buru di tutupi oleh Hutan namun banyak hutan yang rusak sehingga di tumbuh semak belukar.
11	Tahanan politik Pulau Buru, Maluku. Oleh Tati Haryati		Tahanan, politik, pulau Buru.		Proses pemberangkatan ke Pulau Buru merupakan masalah yang muncul ketika para tahanan politik dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak ada upahnya, masalah hak asasi manusia dan membangun insfrakstruktur yang ada di Pulau Buru.
12	Suku bangsa di Kabupaten Baru. Oleh:	Menjelaskan situasi dan	Buru, suku, leluhur, keramat, akulturasi.	Kualitatif dan kuantitatif	Sejarah kebudayaan kepulauan Buru, struktur kebudayaan Pulau Buru dan sejarah kebudayaan yang muncul di Pulau Buru pertama kali.

	Eklevina Elrumkuy	perubahanny sosial			
--	----------------------	-----------------------	--	--	--

Sumber: hasil kajian penulis 2019

2.6 Sintesa Teori

Asal muasalnya masyarakat sipil, ialah individu ada dalam kondisi alami prasosial, dan bahwa hubungan mereka menimbulkan masalah. Masyarakat sipil di pandang sebagai ruang sosial dimana individu individu pribadi dan egoistik mengejar kepentingan pribadi, kepemilikan pribadi menjadi media individualistik di bawah payung perlindungan negara untuk membentuk citra diri kontraktual (Hobbes, 1968; Taylor, 1989: 159-76).

Proses terjadinya struktur spasial perkotaan ada tiga yaitu proses alami, direncanakan dan gabungan keduanya. Pola spasial adalah hasil dari interaksi alam dan pasar serta kegiatan usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. pola ini menghasilkan tiga model pola penggunaan lahan konsentris, sektoral dan inti majemuk sedangkan pola spasial yang direncanakan biasanya diterapkan pada kota/kawasan permukiman baru. (hermanis slamet, 1996).

Wujud struktur ruang kota meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan pusat pemerintahan, prasarana jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal) rancangan bangunan kota seperti ketinggian bangunan jarak bangunan, garis langit. Tata ruang kota merupakan manifestasi lingkungan binaan kota, yang merupakan proses pengambilan keputusan oleh banyak pihak kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya melatar belakangi pembentukan lingkungan wujud fisik. (hermanis slamet, 1996).

Unsur unsur pembentukan ruang ada 4 unsur yaitu : 1) Individu manusia (Antropos) dan masyarakat (Society) Di kota besar, terdapat perbedaan komposisi umur dan jenis kelamin, dalam struktur pekerjaan, dalam pembagian tenaga buruh dan struktur social. Hal ini memaksa

manusia untuk mengembangkan karakteristik yang berbeda sebagai individual, kelompok, unit dan komunitas. 2)Ruang kehidupan (Shells) Ruang kehidupan dari perumahan perkotaan memiliki banyak karakteristik meskipun ukurannya bervariasi. Semakin besar ukuran perumahan, semakin internasional karakteristiknya; sementara semakin kecil ukurannya semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal. 3)Jaringan (Network) Salah satu cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur permukiman adalah berhubungan dengan jaringan dan terutama sistem sirkulasi – jalur transportasi dan titik-titik pertemuan (Nodal Point). 4)Alam (Nature) Rumah-rumah kecil perkotaan dapat dibangun di lembah puncak bukit atau gunung untuk menjaga dari keamanan akan tetapi rumah-rumah besar membutuhkan dataran yang luas dan berdekatan dengan jalur utama komunikasi untuk tetap bertahan. Doxiadis dalam Pontoh (2009).

Tipe dasar perkembangan kota, yaitu pertumbuhan, mencakup perluasan permukiman yang sudah ada dan permukiman yang baru sama sekali. Sedangkan transformasi merupakan perubahan menerus bagian-bagian permukiman perkotaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuninya. Doxiadis (1968).

Klasifikasi penggunaan lahan meliputi: lahan permukiman, lahan perdagangan, lahan pertanian, lahan industri, lahan jasa, lahan rekreasi, lahan ibadah. (Sutanto,1977).

Perubahan penggunaan lahan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya. 2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota. 3. Jaringan jalan dan sarana transportasi. 4. Orbitasi, yakni

jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi (Cullingswoth ,1997).

Bentuk perkembangan fisik dan keruangan kota, 1). Perembetan konsentris (Concentris development), yaitu pola pertumbuhan fisik yang merata ke semua sisi yang akan membentuk kenampakan morfologi kota yang relatif kompak. 2). Perembetan memanjang (Ribbon development), yaitu pola pertumbuhan fisik sepanjang jalur transportasi. Perembetan memanjang membuat pembangunan tidak merata ke semua sisi. 3). Perembetan melompat (Leap frog development), yaitu pola perembetan fisik kota yang berjalan secara sporadis dan tumbuh ditengah-tengah lahan pertanian (yunus, 2002).

Penduduk Pulau Buru digolongkan atas tiga kelompok periode menetapnya yaitu orang orang Buru asli sebagai penduduk asli biasanya diistilahkan dengan *Geba Emlia*. Kemudian kelompok para pendatang, sebagai pendatang mereka diistilahkan dengan *Geba Maleli*, pada umumnya kelompok pendatang mendiami daerah pesisir, Geba Maleli juga termasuk orang buru yang tinggal di Belanda dan kemudian kembali selama 40 tahun lamanya. Kelompok ketiga adalah pendatang baru dari Pulau Jawa yaitu transmigran Nasional dan Transmigran angkatan bersenjata yang biasa disebut dengan Tahanan Politik, dari Kodam XV Pattimura Ambon dan para pensinunan Angkatan Darat, kelompok ini ditempatkan didataran rendah Waeapo dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mengembangkan usaha pertanian, Pattikayhatu dkk (1999).

Tabel 2.2 Rumusan Variabel

Landasan Teori	Variabel menurut teori	Variabel amatan
Asal muasalnya masyarakat sipil (Hobbes, 1968)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu 2. Prasosial 3. Masyarakat sipil 4. Ruang sosial 5. Kontaktual 6. Kepemilikan pribadi 	
Proses terjadinya struktur spasial perkotaan . (hermanis slamet,1996).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alami 2. Direncanakan 3. Interaksi alam 4. Pasar 5. Usaha manusia 6. Lahan konsentris 7. Lahan sektoral 8. Lahan inti majemuk 9. kota 10. Permukiman baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkantoran 2. Kawasan Urbanisasi 3. Pertumbuhan Penduduk
Wujud struktur ruang kota (hermanis slamet,1996).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat kota 2. Pusat lingkungan 3. Pusat pemerintahan 4. Jaringan jalan (arteri,kolektor,lokal). 5. Lingkungan binaan kota 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kawasan Transportasi 5. Kawasan peribadatan 6. Kawasan Pendidikan 7. Kawasan Permukiman

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Sosial 7. Politik 8. Budaya 9. Lingkungan binaan kota 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Kawasan Perumahan 9. Kawasan Petanian 10. Kawasan Industri 11. Kawasan Perdagangan dan Jasa 12. Lokasi pembuangan Tahanan Politik 13. Jaringan air bersih 14. Jaringan listrik 15. Jaringan telekomunikasi 16. Jaringan jalan 17. Jaringan irigasi dan Drainase
<p>Unsur unsur pembentukan ruang</p> <p>Doxiadis dalam Pontoh (2009).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu 2. Masyarakat 3. Perumahan 4. Jaringan jalan 5. Alam 	
<p>Tipe dasar perkembangan kota</p> <p>Doxiadis (1968).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permukiman yang sudah ada 2. Permukiman baru 	
<p>Klasifikasi penggunaan lahan</p> <p>(Sutanto,1977).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan permukiman 2. Lahan Perdagangan 3. Lahan Pertanian 4. Lahan industri 5. Lahan jasa 6. Lahan rekreasi 7. Lahan ibadah 	
<p>Perubahan penggunaan lahan</p> <p>(Cullingswoth,1997).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsentrasi penduduk 2. Aksebilitas terhadap pusat kegiatan 	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jaringan jalan 4. Sarana transportasi 5. Orbitasi 	
Bentuk perkembangan fisik dan keruangan kota (yunus, 2002).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perembetan konsentris 2. Perembetan memanjang 3. Perembetan melompat 	
Penduduk Pulau Buru digolongkan atas tiga kelompok periode Pattikayhatu dkk (1999).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periode masyarakat Awal 2. Kelompok pendatang 3. Transmigran nasional 4. Tahanan politik 	

Sumber: hasil kajian penulis 2019.